

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di Indonesia, sangat dibutuhkannya pengawasan terhadap perusahaan sektor keuangan, dengan adanya pengawasan yang dilakukan ini agar Indonesia mempunyai sistem keuangan yang sehat. Perusahaan pada sektor ini diperlukan juga agar bisa melindungi masyarakat dan konsumen. Dengan cara pengimplementasian manajemen perusahaan akan dihasilkan pencapaian dalam pengawasan sektor keuangan yang dapat diwujudkan perusahaan.

IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) mengartikan dasar *Good Corporate Governance* menjadi suatu metode guna memberi arahan agar dengan jalannya operasional menjadi sesuai dengan harapan *stakeholders*. Dengan adanya tatakelola perusahaan ini juga sebagai mekanisme yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengendalikan operasional supaya berjalan dengan baik.

Peran yang sangat penting pada perusahaan di suatu Negara yaitu pada sektor keuangan karena perusahaan sektor keuangan melibatkan dana masyarakat atau bisa disebut *stakeholders*. Maka dari itu sektor keuangan digunakan dalam objek penelitian ini.

Penerapan tata kelola perusahaan juga harus berpedoman pada nilai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan pada perusahaan karena adanya tata kelola pada perusahaan. Tata kelola dalam perusahaan begitu penting dalam penjagaan dan keberlangsungan perusahaan secara sehat serta dapat bersaing dalam waktu lama dan terjadi peningkatan rasa kepercayaan para investor, pemangku saham serta para pemegang kepentingan. (Kompas, 2017)

Permasalahan *Corporate Governance* semakin menjadi perhatian dikarenakan adanya kasus-kasus yang terkait dengan kinerja perusahaan. Adanya kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus kebijakan BI tahan suku bunga, saham bank buku iv rontok. Suku Bunga yang dipertahankan oleh Kebijakan Bank

Indonesia (BI) dengan acuan *BI7-Day Reserve Repo Rate* tidak mendapat respons positif dari investor pasar saham. Harga saham-saham bank berguguran sampai penutupan perdagangan pada hari Kamis (17/9/2020). Harga saham bank, berdasarkan data dari BEI, hampir semua merah terutama bank-bank besar sekelas BUKU IV (bank umum kelompok usaha, aset utamamencapai Rp 30 triliun). Koreksi harga saham terbesar dicatatkan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) yang drop 3,12% ke harga Rp 775/saham.

Lalu disusul saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang turun 3,08% menjadi Rp 4.720/saham. Lalu saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) turun 2,16% menjadi Rp 2.270/saham. Nasib serupa dialami saham dengan nilai aset terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang drop 1,84% menjadi harga Rp 3.200/saham. Saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun 1,33% menjadi harga Rp 5.575/unit dan saham PT Bank Panin Tbk (PNBN) minus 0,65% ke harga Rp 765/saham. Satu-satunya saham bank BUKU IV yang selamat dari tekanan hari ini yaitu saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Saham bank swasta terbesar ini menguat tipis 0,09% ke level Rp 28.775/saham. Rapat dewan gubernur Bank Indonesia pada 16-17 September 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 4%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,75%," yang dipaparkan oleh Perry Warjiyo, Gubernur BI, dalam keterangan usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode September 2020. Tanggal 16 sampai 17 September 2020 diadakan rapat dewan Gubernur BI guna membahas keputusan terkait tingkat pertahanan BI *7-Day Reverse Repo Rate* dengan nilai 4%, tingkat suku bunga *Deposit Facility* dengan nilai 3,25% serta suku bunga *Lending Facility* dengan nilai 4,75%."Pemaparan dari Perry Warjiyo selaku Gubernur BI pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada September 2020.

Penetapan bahwa perlu adanya penjagaan kestabilan di eksternal saat terjadinya inflasi yang diperkirakan rendah. Tersedianya likuiditas sebagai pendorong pulihnya ekonomi dari dampak Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui metode kuantitas.

Terkait kasus pertama ini adalah Bank Indonesia membuat kebijakan tahan suku bunga yang berakibat BUKU IV (bank umum kelompok usaha, modal inti

diatasRp 30 triliun) menjadi drop harga saham nya, beberapa bank yang terkena dampak adalah PT bank CIMB Niaga Tbk yang drop 3,12%, PT Bank Negara Indonesia yang turun 3,08%, PT Bank Danamon Indonesia Tbk turun 2,16%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk turun 1,84%, PT Bank Mandiri drop 1,33% dan PT Bank Panin Tbk minus 0,65%. Satu satunya yang dapat bertahan dari tekanan ini adalah PT Bank Central Asia yang menguat tipis 0,09%. Dengan adanya hal ini, kebijakan tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari investor pasar saham (CNBC, 2020). Salah satu hal yang berhubungan dengan turunnya persentase harga saham adalah performa perusahaan yang kurang maksimal, serta adanya kasus ini juga mampu mempengaruhi kinerja perusahaan yang menurun. Bank yang dapat bertahan dengan kebijakan baru ini, dapat dikatakan dengan kinerja perusahaan nya mencapai maksimal, sedangkan Bank yang sedikit kesulitan dengan adanya kebijakan ini, berarti kinerja perusahaan nya harus ditingkatkan lagi agar dapat bertahan bahkan dapat meningkatkan persentase harga saham nya secara perlahan.

Kasus yang kedua terkait dengan bank BJB yang sudah beberapa kali terlibat kasus kredit fiktif dari berita berdasarkan keuangan serta kinerjanya. Dalam 10 tahun terakhir berbagai kasus melanda Bank BJB, terungkapnya 4 kasus yang terjadi di perseroan mengenai kredit fiktif berhasil diketahui oleh pihak kepolisian. Bank BJB dan bank BJB syariah terlibat dalam kasus kredit fiktif tersebut.

Bank BJB Cabang Sukajadi menjadi kasus pertama terkait tentang kredit macet sebesar Rp76,18 Miliar Rupiah yang di ungkap pada tahun 2013. Kasus selanjutnya terjadi di Bank BJB Cabang Surabaya terkait kasus yang sama yaitu kredit macet sebesar Rp58,2 miliar dan berhasil diungkap pada tahun 2014. Kasus selanjutnya terjadi di Bank BJB Cabang Sukabumi dalam kasus pemberian kredit fiktif dengan nilaisebesar Rp38,7 miliar dan berhasil diungkap pada tahun 2016 dan yang terakhir dengankasus yang sama yaitu kredit fiktif yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah sebagai penyalurnya dengan nilai sebesar Rp548 Milliar dan berhasil diungkap pada thun 2017.

Berdasarkan sudut pandang finansial, Bank BJB memiliki kinerja yang tak terlalu baik, walaupun perseroan mengalami kenaikan pada nilai laba yaitu sebesar 27,73 persen. Berjalannya laba tahunan mampu didistribusikan untuk pemilik

dana di tahun 2018 dengan nilai Rp1,54 triliun yang tadinya hanya sebesar Rp1.21 Triliun padatahun 2017. Peningkatan pertumbuhan berdasarkan pendapatan yang tadinya bernilai Rp11.41 Triliun pada 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp11.84 triliun pada tahunselanjutnya atau tumbuh sebesar 3.71 persen. Di sisilain keuangan perseroan mengalami defisit. Operasi emiten yang berasal dari aktivitas arus kas yang terjadi padaBank BJB mengalami deficit sebesar Rp6.07 triliun di tahun 2018 sedangkan pada tahun sebelumnya terjadi surplus sebesar Rp2.58 triliun.

Aset operasi yang dilakukan perseroan mengalami penurunan sehingga menyebabkan sebagian besar datanya menjadi negatif, hal tersebut berpengaruh terhadap wesel ekspor, reverse repo, surat berharga dan efek pembelian yang dijanjikanakan terjual lagi atau obligasi. Dalam setahun terakhir nilai asset obligasi turun menjadiRp1.01 Triliun dan begitu juga menurunnya nilai RR begitu curam yakni menjadi Rp2.49 triliun. Alasan lain juga tergambar dari kenaikan dalam liabilitas operasi yaituturunnya nilai giro sebesar Rp1.66 triliun pada tahun lalu, deposito berjangka sebesar Rp1.31 triliun dan simpanan dari bank lain sebesar Rp1.8 triliun (Finansial Bisnis, 2019). Dalam berita tersebut, harus adanya perubahan atau pembenahan terhadap internal perusahaan. Auditor internal perusahaan berhubungan dengan kinerja perusahaan karena salah satu tugas auditor internal itu mengawasi, membantu manajemen dan dapat meminimalisasi risiko yang dapat terjadi. Diharapkan auditor internal mampu mencapai poin yang lebih besar guna meningkatnya efektivitas, efisien serta daya guna performa, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Terkait dengan kasus yang terkait dengan kinerja perusahaan, harus adanya sebuah prosedur yang sesuai untuk mengurangi kasus-kasus yang berhubungan dengan kinerja perusahaan yaitu dengan adanya *Good Corporate Governance*. Dengan adanya metode manajemen yang benar dan disiplin pada prosedur, diharapkan dapat mengendalikan perusahaan dengan baik dan bisa menaikkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan bisnis perusahaan.

Menurut Mulyati (2011) menyebutkan *Good Corporate Governance* adalah factor penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomis, antara lain berkaitan dengan tata kelola perusahaan, pemangku saham, dewan komisaris dan pemegang

kepentinganyang lain. Masalah kontrak serta pembatasan perikalu sangat penting diawasi oleh tatakelola, sehingga tidak akan terjadi adanya kepentingan pribadi. Metode monitoring yang dilakukan secara manipulatif mampu disesuaikan dengan adanya kepentingan lain. Perusahaan meyakini pada implementasi *Good Corporate Governance* adalah pengimplementasian yang dihubungkan dengan meningkatnya citra perusahaan melalui ketegasan dalam beretika dalam bisnis serta cara kerja yang sudah lama menjadi bentuk rasa komitmen perusahaan. manajemen yang benar tentunya bukan sajamelalu ditunjukkannya selama periode tertentu, tetapi perusahaan yang selalu konsisten. Investor dapat mengetahui ataupun menilai bagaimana kinerja perusahaan yang sesungguhnya, sehingga para investor memberanikan diri untuk tanam modal yang dimiliki pada perusahaan (Mita dan Tri, 2019)

Menurut Salim (2017) contoh dari prosedur internal yaitu dewan komisaris dan prosedur eksternal yaitu kepemilikan institusional dan komite audit diharapkan dapat menanggulangi masalah keagenan.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris membutuhkan adanya dukungandari beberapa komite, salah satunya yaitu Komite Audit. Komite Audit itu sendiri diciptakan agar mampu mengemban tugas serta kegiatan dewan komisaris secara fungsional. Komite audit bertanggung jawab atas pendapat yang disampaikan secara professional independen untuk para dewan komisaris terkait *reporting* atau suatu hal yang dilampirkan para pimpinan kepada dewan komisaris.

Komisaris independen sangat penting guna mengawasi fungsi dewan komisaris pada suatu perusahaan. Menurut Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) adalah Komisaris Independen yang ada di pedoman tata kelola perseroan yang baik adalah “komisaris dari pihak luar”. Dasar kedisiplinan yang ditegakkan komisaris independen didasari melalui *code of good corporate governance* yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, keadilan dan adanya pertanggungjawaban. Melalui kode tersebut harapan menjadi kebijakan yang benar yang nantinya akan berdampak baik pada pemangku saham serta para anggota yang memiliki kepentingan lain.

Begitu penting jika suatu perusahaan memiliki “kepemilikan institusional”.

Dengan adanya kepemilikan institusional ini dapat menunjukkan mekanisme tata kelola perusahaan yang kokoh serta bisa juga dimanfaatkan dalam mengawasi manajemen perusahaan dan dengan adanya kepemilikan institusional ini bisa berfungsi dalam penyelerasan suatu hajat setiap manajemen dengan para pemangku saham.

Selain kepemilikan institusional, ada juga ukuran perusahaan yang sangat penting untuk memberikan petunjuk tentang karakteristik atau kondisi perusahaan sebagai tolak ukur yang dipakai untuk menentukan ukuran perusahaan.

Terdapat beberapa hasil penelitian berkaitan tentang *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan atau bisa disebut juga *Gap Research*. *Gap research* penelitian ini adalah Penelitian Effrita, Kartika, dan Siti (2020), menghasilkantemuan bahwa para dewan komisaris tak memiliki eksistensi pada performa perusahaan. Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan riset Rediyanto dan Sumadi(2019), yang menghasilkan temuan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positifpada performa perusahaan, yang menghasilkan tingkat kebebasan yang diberikan dewan komisaris mampu meningkatkan performa. Rediyanto dan Sumadi (2019)berpendapat juga terkait dengan komite audit, Mereka berpendapat bahwa komite audittidak memiliki pengaruh terhadap performa perusahaan. bentuk pengawasan yang dilakukan komite audit merupakan pengaplikasian melalui pengeluaran agensi guna memberikan pengurangan dalam setiap masalah, pada nyatanya pengaruh kinerja yangdiawasi oleh komite audit tidak terdapat pengaruh karena pengawasan tersebut tidak langsung terkenda dampak ke perusahaan melainkan para komite audit harus tetap memberi keputusan pada dewan komisaris. Wahyutama dkk (2019) menemukan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. pengawasan dalam pengendalian perusahaan yang dilakukan dewan komisaris memiliki dampak besar terhadap kepemilikan institusionalyang nantinya akan terjadi manfaat yang bagus terhadap asset serta modal yang dimilikiperusahaan menjadi lebih efisien. Bagas dan Harry (2020) menemukan bahwa sama dengan Wahyutama dkk yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Rediyanto dan Sumadi (2019) dan Budi (2019), Bagas dan Harry (2020), dan Mita dan Tri (2019), mempunyai

pendapat yang sama yaitu ukuran perusahaan berpegaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kinerja akan semakin baik jika perhitungan pada perusahaan semakin tinggi. Hal tersebut terjadi dalam cara pertahanan serta pengembangan perusahaan melalui dana yang digelontorkan dari modal bank itu sendiri maupun hutang. Hal ini mempunyai berdampak baik bagi perusahaan dan menjadikan perusahaan konsisten dan mampu menghasilkan laba yang cukup.

Berdasarkan fenomena serta *Gap Research*, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Perusahaan Sektor Keuangan Tahun 2016-2019)”. Riset ini merujuk pada riset terdahulu yakni (Bagas dan Herry, 2020), perbedaan riset saya dengan riset sebelumnya adalah pertama dari tahun penelitian, kedua variabel x adanya perubahan. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel kepemilikan asing, sedangkan saya merubah variabel nya menjadi dewan komisaris lalu variabel kepemilikan manajerial saya rubah menjadi variabel komite audit dan riset ini menggunakan Tobin’s Q.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disusun diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan?
- b. Apakah terdapat pengaruh jumlah komite audit terhadap kinerja perusahaan?
- c. Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan?
- d. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan?
- e. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dengan jumlah dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
- b. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dengan jumlah komite audit terhadap kinerja perusahaan.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dengan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
- d. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dengan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.
- e. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dengan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam hasil penelitian adalah:

- a. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Perusahaan, diharapkan dapat menjadikan bahan informasi dan perbandingan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan
 - 2) Bagi pemegang saham, diharapkan dapat membantu pemegang saham untuk mempertimbangkan dan memberikan informasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan
 - 3) Bagi pengguna laporan keuangan, diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menganalisis data dalam laporan keuangan dan kebutuhan pengumpulan data.
 - 4) Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori yang ada kaitannya dengan di bidang *Corporate Governance* berdasarkan Undang – undang, serta menjadi bahan referensi bagi peneliti lain terkait topik yang sama.